

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH SUB
URURAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Agung Hidayat

Asdaf Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat

Program studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: agungwaraman955@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dadan Adam Ismail, IP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): One of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is Minimum Service Standards (SPM). SPM is a benchmark for the service quality of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in providing services to the community. SPM still does not meet the target indicator for minimum service standards by the disaster sub-affairs in accordance with Permendagri number 101 of 2018 Basic Service Technical Standards in the Minimum Service Standards for the Regional Disaster Sub-Affairs of South Solok Regency.

Purpose: The purpose of this study was to determine the implementation of the Minimum Service Standard policy by the Disaster Sub-Agency at the Regional Disaster Management Agency, South Solok Regency, West Sumatra Province. **Method:** The method used in this study is descriptive qualitative with interviews, observations and documents as data collection techniques. **Result:** The findings found by the authors in this research are the delivery of information or socialization related to the Minimum Service Standards program, implementing staff resources are inadequate, facilities and infrastructure are still limited, incentives for implementing staff have been fulfilled, the system for appointing bureaucrats at BPBD is not optimal, and good relations and cooperation with other relevant agencies. **Conclusion:** This study shows that the implementation of the Minimum Service Standards Policy by the Disaster Sub-Agency of the Regional Disaster Management Agency, South Solok Regency, West Sumatra Province has been going quite well but is still not optimal, because socialization related to minimum service standards has been going well but there are still problems with limited infrastructure as well. become an obstacle in the implementation of minimum service standards in South Solok Regency.

Keywords: Policy Implementation, BPBD, SPM

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur mutu pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SPM masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 101 tahun 2018 Standar

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. **Metode Penelitian:** Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. **Hasil/Temuan :** Temuan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitan ini adalah penyampaian informasi atau sosialisasi terkait program Standar Pelayanan Minimal, sumber daya staff pelaksana sudah kurang memadai, sarana dan prasarana masih terbatas, insentif bagi para staff pelaksana sudah terpenuhi, sistem pengangkatan birokrat di BPBD belum maksimal, serta hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sudah baik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum maksimal, dikarenakan sosialisasi terkait standar pelayanan minimal sudah berjalan baik tetapi masih ada permasalahan sarana prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal di Kabupaten Solok Selatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPBD, SPM

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Implementasi proses yang melibatkan sejumlah sumber sumber yang di dalamnya termaksud manusia dana dan kemampuan operasional, baik dalam pemerintahan maupun swasta (individu atau pun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan Widodo (2001:193). Pelayanan public menurut merupakan “kengiatan yang di lakukan seseorang ataupun berkelompok dengan berlandaskan faktor material melaluo sistem, prosedur dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya” Moenir (Kurniawan 2005:7).

pelayanan ialah suatu proses keseluruhan sebuah pembentukan citra dari perusahaan, baik dengan melalui media berita, membentuk sebuah budaya perusahaan secara internal, ataupun melakukan sebuah komunikasi mengenai pandangan perusahaan pada para pemimpin pemerintahan seta publik yang lainnya yang berkepentingan Loina (2001). Bencana adalah suatu kejadian yang ekream dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia harta benda atau aktivitas sebagai pada tingkat yang menimbulkan bencana soehatman (2011:10)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Standar pelayanan merupakan ukuran yang di bekukan dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagai pedoman yang di taati dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan (Hardiasyah ,2011:28) standar pelayanan minimal merupakan ukuran yang di bekukan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang wajib di taati oleh pemberian atau penerima pelayanan surjadi (2012:69).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang penulis, mereka lebih banyak menyoroti tentang Standar Pelayanan Minimal seperti penelitian oleh Anggi Dwi Putra (2001) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumadeng”. Hasil dari penelitian menunjukkan jarak yang sulit di jangkau menjadi masalah bagi partisi penanggulangan bencana karena semakin lama kebakaran terjadi maka semakin besar dampaknya. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pemadam kebakaran membuat penanggulangan bencana menjadi tidak efektif dan efisien.

Ada juga penelitian yang mengenai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Lalu Mariawan Alfarizi (2015) yang berjudul “Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam Sebagai Upaya Mewujudkan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Tujuan dari penelitian ini bagaimana standar pelayanan minimal yang diterapkan di masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam.

Selain itu, ada penelitian mengenai Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal oleh Wiguna (2017) yang berjudul Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini tercapainya indikator target penanggulangan kebakaran kota Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69/2012. Sejauh ini, banyak yang belum tercapai. Temuan ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran sehingga menghambat penanganan bencana

Selain itu ada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan program seperti halnya penelitian Desy Lestary (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa bumi Kabupaten Lombok Utara” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di kabupaten Lombok utara.

Terdapat juga penelitian yang menyoroti Impelentasi kebijakan penanggulangan banjir oleh Indah Putri Rahayu (2021) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado”. Hasil dari penelitian ini penanggulangan yang belum terlaksana di beberapa kelurahan antara lain perbaikan drainase dan pembangunan tanggul.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, variabel yang digunakan memiliki perbedaan dengan penelitian Anggi Dwi Putra, Lalu Mariawan Alfarizi, Wiguna, Desy Lestari, Indah putri rahayu. Fokus penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian Anggi Dwi Putra. Sehingga penelitian ini menjadi menarik karena masih kurangnya penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana terutama yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

II METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut menurut Nasir (2014:43), metode penelitian merupakan sebuah metode dalam meneliti suatu objek, kondisi, sekelompok manusia, sekelas peristiwa pada masa sekarang, ataupun suatu sistem pemikiran. Menurut Nasir (2014), tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan penjelasan, ilustrasi, penyajian atau gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan ciri-cirinya serta hubungan antara penelitian yang diteliti. Narbuko (2015:44) “penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menjelaskan penelitian untuk menjelaskan pemecahan suatu masalah data-data dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya

Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berdasarkan filsafat digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah dan penelitian merupakan instrumen kunci teknik pengumpulan data dilaksanakan secara gabungan (trianggulasi), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi, wawancara dan dekomntasi, obsevasi menurut Sugiyono (2012:13) dalam bukunya mendefinisikan operasional sebagai struktur atau properti yang harus diperiksa untuk mengukur suatu variabel. Noor (2011:140) Alasan peneliti melakukan observasi yaitu guna mengemukakan gambaran realita perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Sanapiah (Sugiono,2015:310), Observasi terbagi atas 3 obsevasi partisipasi, observasi terus terang dan tersamar, observasi tak terstruktur.

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:138) menyebutkan ada 3 yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur. Sedangkan dekomntasi, Sugiono (2014:274), dokumen adalah kumpulan catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya . Sedang kan menurut Riyanto (2012:103), metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan catatan data yang sudah ada. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif diawali dengan mengkaji data yang didapat dari berbagai macam sumber, baik melalui kegiatan wawancara, observasi ataupun dari dokumentasi. Data terlebih dahulu dibaca, diteliti, diverifikasi dan dipahami untuk disajikan dengan tambahan interpretasi data tersebut.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III (2010) untuk mengkaji implementasi Kebijakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi atau perintah agar nantinya informasi atau perintah tersebut tersampaikan dengan baik. Komunikasi ialah kegiatan penyampaian informasi, gagasan atau berita kepada orang lain yang menjadi penerima

informasi dengan harapan informasi atau berita yang diterima sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Edward III menyampaikan bahwa umumnya membahas tiga hal penting dalam komunikasi yaitu transisi atau penyampaian program, kejelasan petunjuk yang di sampaikan, konsistensi terhadap perintah. Masyarakat kabupaten Solok Selatan selaku kelompok sasaran menerima komunikasi langsung dari para implementor (pelaksana kebijakan). Tujuan dari adanya komunikasi ialah agar masyarakat mengetahui dengan jelas keadaan yang terjadi di lapangan, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan agar tercapainya tujuan kebijakan standar pelayanan minimal dengan baik dan maksimal. Dari berbagai data yang diperoleh tersebut menjelaskan bahwa faktor komunikasi terkait program standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh BPBD sudah cukup baik, transmisi komunikasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Hasil penelitian mengenai faktor komunikasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di Kabupaten Solok Selatan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Solok Selatan.

3.2 Sumber Daya

Faktor sumber daya sangatlah berperan penting karena faktor ini merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya suatu kebijakan. Walaupun pemerintah implementasi kebijakan diteruskan secara jelas dan konsisten, tapi jika dalam pelaksanaannya sumber daya tidak memadai maka implementasi kebijakan cenderung tidak berjalan secara maksimal. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana tentunya dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan. Sumber daya yang dimaksud ialah staff pelaksana yang berintegritas dan kompeten sesuai dengan bidangnya dan memiliki kewenangannya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, dimana dalam pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh sarana, prasarana, serta anggaran yang tersedia.

3.3 Disposisi

George C. Edward III dalam Winarno (2005:142) , kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor mempengaruhi konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi atau sikap para pelaksana sangat penting untuk implementasi Kebijakan karena jika para pelaksana memiliki sikap positif dan memberi dukungan terhadap adanya implementasi Kebijakan maka suatu kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi, jika para pelaksana menolak terhadap adanya implementasi kebijakan maka dalam pelaksanaannya implementasi Kebijakan akan mengalami beberapa kendala.

Dalam implementasi kebijakan standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana BPBD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen dari para pelaksana agar tercapainya keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa: Pertama, dalam pengangkatan birokrat di BPBD Kabupaten Solok Selatan sudah maksimal, karena didasari oleh pengalaman yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, hal tersebut BPBD Kabupaten Solok Selatan terus melakukan pelatihan internal yang diberikan kepada aparatur agar memiliki kompetensi khususnya dalam bidang penanggulangan bencana Kedua, pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan sudah maksimal, karena para pelaksana kebijakan di BPBD Kabupaten Solok Selatan menerima insentif atau tunjangan kerja setiap bulannya untuk mendorong dan memotivasi para pelaksana kebijakan untuk bekerja lebih optimal.

3.4 Struktur Birokrasi

Aspek selanjutnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana adalah membutuhkan dukungan dari birokrasi yang merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan organisasi secara keseluruhan. Aspek implementasi yang mempengaruhi outcome adalah mekanisme yang tertuang dalam standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan oleh pelaksana yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan agar dalam setiap implementasi kebijakan tidak terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan dari kebijakan. pelaksanaan kebijakan BPBD Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa adanya tindakan otoriter dari atasan.

3.5 Diskusi Temuan

Adanya pelaksanaan program Standar Pelayanan Minimal memberikan dampak positif di berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Solok Selatan karena melalui program ini masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan terkait Standar Pelayanan Minimal oleh Sub Urusan Bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Solok Selatan. Temuan yang penulis dapatkan yaitu staff pelaksana dalam program ini melaksanakan tugas dengan baik karena adanya insentif yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan program, bahwa dengan kekuatan personel yang sudah efektif, fokus yang jelas pada tugas-tugas sehingga dapat bekerja secara optimal dan efisien.

Layaknya program lain, program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah sosialisasi yang dilakukan belum bersifat berkelanjutan, selain itu sarana prasarana sebagai faktor pendukung dalam program ini masih belum maksimal sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan program Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana BPBD Kabupaten Solok Selatan yakni harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat paham bagaimana bertindak saat terjadinya bencana.

IV. KESIMPULAN

Penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana BPBD Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan program kerja yang bertujuan untuk Standar Pelayanan Minimal.

Adapun indikator implementasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Edward III, yaitu :

1. Komunikasi yaitu penyampaian informasi Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan dengan baik di laksanakan di 8 kecamatan.
2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Solok Selatan jumlah personil yang ada di BPBD Kabupaten Solok Selatan masih kurang tidak ada nya Tenaga Harian Lepas (THL) dan jumlah pegawai BPBD Kabupaten Solok Selatan hanya berjumlah 29 orang sehingga ada keterbatasan jumlah personil dalam pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan lapangan.

3. Disposisi yaitu sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana di kabupaten solok selatan sudah baik. Dalam hal pengangkatan sudah birokrat sudah teruji dan di tempatkan sesuai dengan kopetensinya berdasarkan tes yang di lakukan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya masing-masing sudah baik walaupun dalam kendala adalah jumlah personil.

4. Struktur Birokrasi yaitu pemisahan tugas dan tanggung jawab yang baik dalam pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Selain itu Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana mencakup tiga jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan evakuasi korban.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana di Kabupaten Solok Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, A., dan Narbuko. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung

Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang, Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan*, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Simangunsong. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*.

Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno. 2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Media Press

